



LKJIP 2024

KECAMATAN SUKOREJO

KOTA BLITAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Oleh Camat Sukorejo Kota Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024. Laporan ini menjadi wujud komitmen kami dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai bagian dari tugas kami yang mengemban amanah dari masyarakat, penyusunan laporan ini telah melalui serangkaian proses evaluasi, analisis, dan refleksi atas berbagai program dan kegiatan yang telah kami jalankan selama tahun 2024. Setiap langkah yang kami ambil, baik itu dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program-program pembangunan, maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, kami lakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Laporan ini mencerminkan komitmen kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sukorejo. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi kita semua dalam merancang langkah-langkah strategis ke depan, guna mencapai visi dan misi pembangunan yang lebih baik untuk Kecamatan Sukorejo.

Akhir kata, kami berharap agar laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan kedepannya.

Blitar, 28 Februari 2025

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR



IITO BASKORO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19690601 199003 1 010

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024 tentu akan berbeda nuansa dengan tahun 2023 dan sebelumnya karena pada tahun 2024 kita telah terbiasa atas kemajuan penggunaan teknologi dampak dari pandemi covid-19. mengingat di Tahun 2021 dan 2022 kita semua berada pada suasana pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap kinerja di pemerintahan. Mulai tahun 2023 banyak program dan kegiatan yang pelaksanaannya difokuskan untuk percepatan pemulihan perekonomian setelah masa pandemi covid-19, dan dilanjutkan pada tahun 2024 termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah, maka salah satunya dengan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan Visi **"KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT"**. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup".

Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mendukung perwujudan Misi ke-5 yaitu: **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi"**.

Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan anggaran **Rp. 30.803.293.364,00** (setelah perubahan APBD 2024) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2024 sebesar **98,71 %** atau sebesar **Rp. 30.405.157.337,00**. Besarnya nilai serapan dapat kita ambil kesimpulan bahwa hal tersebut menunjukkan

Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" dengan indikator kinerjanya "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan” dengan target bernilai baik (89,10). Pengukuran kualitas pelayanan publik dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Semester I dan II. Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai IKM 90,61.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo tercapai sangat baik dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 yaitu 90,61. Sedangkan Pengukuran kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Sukorejo 100,22%, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan Publik” yang dijabarkan dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja , dengan didukung 4 (empat) program dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100 %	Rp. 623.698.404,00	Rp 590.230.108,00	94,63 %	1,06
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	100 %				
3	Meningkatnya kualitas pembangunan	Persentase kelurahan berdaya	100%	100 %	100 %	Rp. 17.000.398.852,00	Rp. 16.910.813.577,00	99,47 %	1,01

	wilayah								
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %				
		Persentase RT Berdaya	100%	100 %	100 %				
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %				
6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)	A (85,37)	100,67 %	Rp. 13.179.196.108,00	Rp. 12.904.113.652,00	97,91 %	1,03

Pada tabel tersebut dapat kita simpulkan capaian kinerja pada ketiga sasaran tersebut, yaitu :

1. Sasaran I : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan tercapai sebesar 100%.
2. Sasaran II : Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah dengan indikator Persentase kelurahan berdaya tercapai sebesar 100%.
3. Sasaran III : Meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 100,67%

Disamping itu dapat diambil kesimpulan terkait analisa Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Sukorejo dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Analisis Sasaran Strategis 1: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan" tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,06. Dapat dikatakan telah

efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,63 %. Meskipun demikian pada sasaran I tersebut terdapat beberapa permasalahan, yaitu ketika Pejabat berwenang tidak sedang berada di tempat dikarenakan ada kegiatan lain, sehingga pelayanan kecamatan tertunda. Upaya Tindaklanjutan yang kami lakukan dengan adanya hambatan tersebut, maka Kecamatan Sukorejo memanfaatkan Tanda-tangan Elektronik sebaik mungkin, serta meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dan pejabat berwenang dalam mempergunakan Teknologi Digital demi meningkatkan serta memperbaiki layanan di Kecamatan Sukorejo. Selain itu, permasalahan yang menjadi penghambat sasaran I, yaitu pergantian petugas layanan yang baru sehingga kompetensi petugas pelayanan yang masih kurang. Upaya Tindaklanjutan yang kami lakukan, yaitu dengan mengadakan peningkatan kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Sukorejo dengan memberikan Bimbingan Teknis Layanan.

2. Analisis Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,01. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,47 %. Meskipun demikian terdapat permasalahan yang menjadi Faktor Penghambat pada Sasaran II, yaitu masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat. Upaya tindaklanjutan yang kami lakukan, yaitu dengan mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sektor yang terkait di lingkup Kecamatan Sukorejo.
3. Analisis Sasaran Strategis 3: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,03. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100,67% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 97,91%. Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Sukorejo tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo, sehingga pada tahun 2024 nilai SAKIP Kecamatan Sukorejo adalah A (85,37) yang artinya kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo adalah Sangat Baik dikarenakan tertib administrasi, tepat waktu dan sesuai dengan standar. Meskipun demikian, pada sasaran ini terdapat permasalahan yang masih perlu diperhatikan yaitu kurangnya SDM perangkat daerah yang mampu dalam IT untuk bekerja dengan aplikasi. Upaya tindaklanjutan yang kami lakukan, yaitu dengan mengadakan

Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah Kecamatan Sukorejo agar mampu dalam IT dan dapat bekerja menggunakan aplikasi terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Dasar Hukum	8
E. Aspek-Aspek Strategis	10
F. Isu-Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	20
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi Tahun 2024	21
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024.....	36
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Kecamatan Lain	33
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome).....	34
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	34
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
C. Prestasi/Penghargaan.....	39

BAB I	PENUTUP	40
A.	Kesimpulan.....	40
B.	Langkah Perbaikan.....	43
LAMPIRAN.....		47
A.	Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026	48
B.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan APBD Tahun 2024	49
C.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	86
D.	Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	14
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran.....	15
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Non Administrasi Umum	16
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Umum Tahun 2022	17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024	18
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024	20
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	22
Tabel 3.2.1 Komponen Penilaian SAKIP.....	23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023.....	32
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2021-2026.....	32
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023dan Tahun 2024 Dengan Kecamatan Lain.....	33
Tabel 3.6 Alokasi Sasaran Pembangunan Kecamatan Sukorejo Tahun 2024	34
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024	36
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2024.....	37
Tabel 3.9 Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan	38
Tabel 3.10 Prestasi/Penghargaan Kecamatan Sukorejo Tahun 2024.....	39
Tabel 5.1 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Kecamatan Sukorejo Tahun 2024.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan	2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kelurahan	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pelaporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam amanatnya menyebutkan Kepala SKPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibility*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Blitar terutama misi ke 5 yaitu, **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**, yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar.

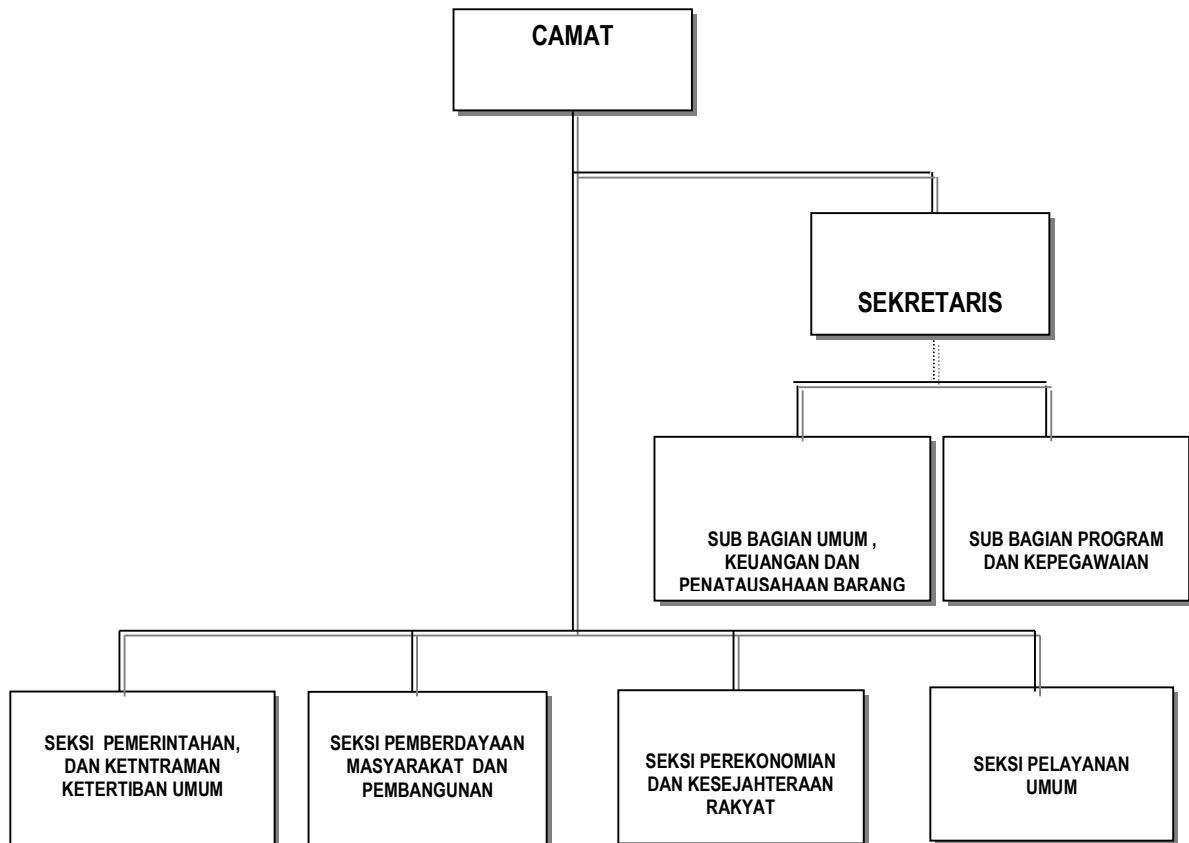
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang didalamnya terdapat kelurahan (kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan bukan merupakan organisasi perangkat

daerah) maka Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan sebagaimana tersebut di atas kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

I. KECAMATAN

I.1 KEDUDUKAN KECAMATAN :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota Blitar yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

I.2 FUNGSI KECAMATAN

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
- e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;

- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.3 KEWENANGAN KECAMATAN

Kecamatan mempunyai kewenangan:

- b. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan, dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di kecamatan dan kelurahan;
- c. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- k. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan kelurahan.

II. KELURAHAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dapat kami uraikan sebagai berikut :

II.1 KEDUDUKAN KELURAHAN

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

II.2 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

a) Lurah

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

b) Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

c) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

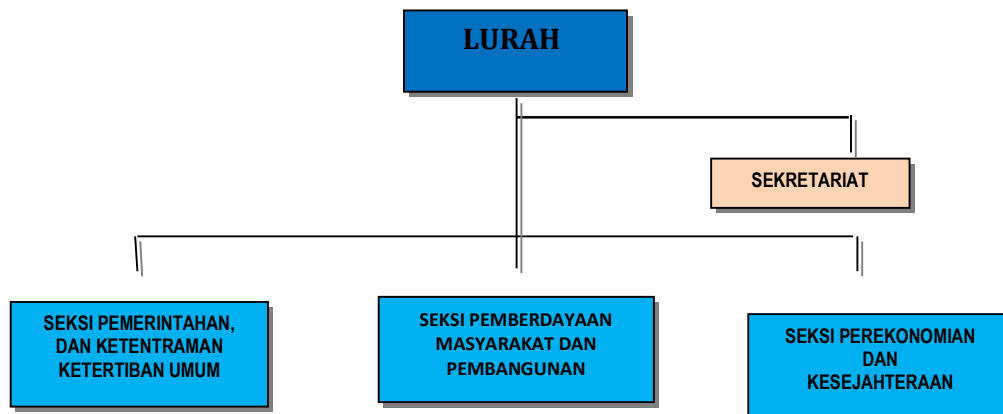
e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah :

1. Memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi;
2. Sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar kepada pemerintah kota maupun masyarakat.
3. Memberikan informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Blitar akhir tahun anggaran 2022.

Adapun tujuan disusunnya pelaporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja terukur kepada kepala daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek – aspek yang menjadi dasar kinerja Kecamatan Sukorejo bersumber dari tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam uraian dibawah ini :

Faktor Kekuatan :

1. Terdapat SOP pada tiap tahapan pelayanan masyarakat dan perkantoran.
2. Sarana dan prasarana kantor penunjang tugas pokok dan fungsi terpenuhi dengan baik.
3. Cepatnya tingkat responsibility SDM terhadap kondisi lingkungan.
4. Harmonisnya tingkat hubungan kinerja antara kecamatan dan kelurahan.
5. Kelancaran tugas terbantu dengan penerapan teknologi informasi.

Faktor Kelemahan :

1. Dari segi kuantitas dan kualitas SDM yang kurang memadai.
2. Tata kelola perkantoran belum mencerminkan tata kelola perkantoran modern.
3. Berbedanya persepsi dan tingkat pemahaman terhadap peraturan.

Faktor Peluang :

1. Diperluasnya ruang berkarya bagi kecamatan dengan kebijakan Kepada Daerah.
2. Baiknya tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung proses pembangunan di wilayah.
3. Adanya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Adanya sinergi yang baik antara Forpimcam, KUA, Puskesmas, seluruh OPD terkait dan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Faktor Tantangan

1. Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas (Diklat, TOT, *in house training*) bagi perangkat kecamatan.
2. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima yang cepat, efektif, dan efisien.

F. ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di

masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sukorejo antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Sukorejo, baik yang ada di Kecamatan maupun di Kelurahan. Hal ini dikarenakan ruangan untuk pelayanan di Kecamatan masih belum memadai dikarenakan perlunya pengembangan kantor agar memaksimalkan sarana prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat sedangkan yang di kelurahan terdapat beberapa lokasi kelurahan yang tidak memadai sehingga diperlukan relokasi agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ;
2. Belum optimalnya koordinasi pembangunan infrastruktur kewilayahannya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya system yang terhubung sampai tingkat RT ataupun jajaran samping maupun OPD lainnya. Bila ini terwujud maka tata kelola manajemen pemerintahan modern dapat terwujud.
3. Belum optimalnya koordinasi pembangunan kewilayahan di Kecamatan Sukorejo. Hal tersebut dikarenakan belum adanya forum lintas OPD beserta warga yang membahas secara rutin permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah setiap 3 atau 6 bulan sekali. Hal ini penting dilakukan sebagai wadah penyampaian informasi, kontrol pelaksanaan musrenbang tahun sebelumnya, pemecahan masalah di masyarakat dan yang paling utama yaitu antisipasi munculnya suatu masalah di masyarakat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di Kecamatan Sukorejo. Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan dari Pemerintah, dan kurangnya kapasitas serta kemampuan masyarakat.
5. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan, sehingga memerlukan klarifikasi berbagai pihak yang terlibat, sehingga berdampak pada terhambatnya percepatan penyaluran bantuan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target objektif kuantitatif tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja sebagai bentuk komitmen yang menjabarkan rencana kinerja dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan strategis memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta isu-isu strategis, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan Visi **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT”**, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mendukung perwujudan Misi ke-5, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”**.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Dalam rencana strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terdapat tujuan dan sasaran yang menjadi patokan dalam suatu kegiatan, yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89,10)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)

Sumber: Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam mendukung misi ke-5 yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”** telah ditetapkan kinerja utama Kecamatan Sukorejo yang didokumenkan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sukorejo 2021-2026 yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**. Kinerja utama ini ditetapkan dengan memperhatikan bahwa tugas pokok fungsi kecamatan sesuai dengan peraturan Walikota Blitar yaitu sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai unsur pelaksana setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

Misi V: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan. 2. Peningkatan pengendalian pelayanan publik. 3. Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta keprotokolan.
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan. 2. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan.
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan. 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Sedangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Non Administrasi Umum yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Non Administrasi Umum Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber : Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Selain program dan kegiatan di atas, program dan kegiatan dalam Urusan Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Administrasi Umum Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota atau Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan kesepakatan antara kepala daerah sebagai pemberi amanah dan pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja fokus mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Perjanjian Kinerja berubah dikarenakan perubahan APBD sehingga Perjanjian Kinerja tersebut juga harus diubah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89,10)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)
NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	623.698.404,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.059.013.002,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	941.385.850,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.179.196.108,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	TOTAL	30.803.293.364,00	PAD

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Sukorejo Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja utama dan sasaran strategis. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian IKU dan sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89,10)	Sangat Baik (90,61)	101,69%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100%

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)	A (85,37)	100,67%

Sumber: Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tribulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo adalah merupakan indikator tujuan, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikatornya tercapainya nilai Baik (89,10) pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan.

1) . ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan ” bernilai baik. Dalam melaksanakan Pengukuran Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Sukorejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 14 tahun 2017, yang menitik beratkan pada 9 (sembilan) unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat yang meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana.

Pada tahun 2024 Kecamatan Sukorejo melaksanakan 2 (dua) kali pengukuran kualitas pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 dan bulan Juli sampai dengan Desember 2024.

Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan tersebut jumlah Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester I, yaitu 86,80 dan pada Semester II, yaitu 94,41. Untuk menghitung nilai IKM digunakan rumus, yaitu $(\text{Nilai SKM Semester I} + \text{Nilai SKM Semester II}) : 2$, sehingga didapatkan $(86,80 + 94,41) : 2 = 90,61$. Jadi nilai IKM Pelayanan Kecamatan Sukorejo pada tahun 2024, yaitu 90,61, dimana nilai tersebut termasuk ke dalam kategori "SANGAT MEMUASKAN" sesuai dengan tabel di bawah ini :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	TIDAK MEMUASKAN
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG MEMUASKAN
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	MEMUASKAN
4	3,26-4,00	81,26-100	A	SANGAT MEMUASKAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai rata-rata IKM tahun 2024, yaitu 90,61. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan Sukorejo pada tahun 2024 sangat memuaskan.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung :

Selama Tahun 2024 masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Sukorejo adalah sebanyak 1.172 orang. Dari data tersebut semua masyarakat pemohon

layanan merasa puas, yaitu sebanyak 1.172 orang. Apabila kita bandingkan dengan data di Tahun 2023, maka di Tahun 2024 jumlah masyarakat yang melakukan permohonan layanan mengalami kenaikan dibanding Tahun 2023. Dari data seksi pelayanan menunjukkan bahwa di Tahun 2023` terdapat 979 orang yang melakukan permohonan layanan di Kecamatan Sukorejo. Salah satu penyebab adanya kenaikan jumlah angka masyarakat yang meminta pelayanan di Kecamatan Sukorejo karena beberapa layanan meskipun cukup melalui Whatsapp atau cukup hanya di Kelurahan saja dengan aplikasi Silpusitron ataupun dapat langsung ke Dinas Catatan Sipil melalui aplikasi SIPAK, namun antusiasme masyarakat setelah Pandemi Covid-19 untuk langsung ke Kantor Kecamatan dalam mengurus administrasi yang diperlukan sangat tinggi. Dengan penerapan SOP Baru pasca Pandemi Covid-19 dan kemudahan akses layanan melalui aplikasi Whatsapp maupun aplikasi lainnya memudahkan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, SOP disetiap layanan, mulai kepastian persyaratan, kepastian waktu selesainya, kepastian produk layanan dapat diukur dan diketahui oleh penerima layanan juga menjadi indikator kepuasan masyarakat. Prosentase penurunan angka masyarakat yang tidak puas dengan layanan Kecamatan Sukorejo dapat diperhatikan dari 9 indikator Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan pengukuran kualitas layanan sebagai berikut :

1. Persyaratan

Berdasarkan survey yang dilakukan maka masyarakat merasa jelas dengan persyaratan setiap proses layanan yang diberikan serta tidak terlalu sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan telah terinformasikan ke media-media (leaflet, anjungan layanan kecamatan serta media sosial yang mudah diakses baik website, instagram, facebook, whatsapp) yang ada sehingga memudahkan seluruh warga masyarakat diwilayah Kecamatan Sukorejo dalam mencari layanan.

3. Waktu Penyelesaian

SOP masing-masing jenis layanan telah tersusun sehingga memberikan kepastian waktu penyelesaian dari setiap jenis pelayanan sehingga kepastian waktu pelayanan dapat dijamin.

4. Biaya/Tarif *)

Seluruh layanan yang diberikan di Kecamatan Sukorejo tidak dikenakan biaya atau tarif, sehingga layanan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa melihat golongan ekonomi.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Sehubungan dengan SOP setiap jenis layanan telah tersusun maka keluaran setiap jenis layanan dapat diketahui dan sesuai dengan yang ditetapkan.

6. Kompetensi Pelaksana

Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini jumlah komposisi pegawai disetiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mengalami kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, termasuk dalam hal ini Kecamatan Sukorejo. Namun untuk meminimalisir kekurangan tersebut terutama tenaga pelayanan, maka langkah di Kecamatan Sukorejo yaitu melalui penetapan SOP, pelatihan untuk petugas pelayanan.

7. Perilaku Pelaksana

Untuk meningkatkan etika serta estetika petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Sukorejo, maka dilaksanakan secara rutin pelatihan peningkatan kualitas layanan masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk mewujudkan pelayanan yang responsif, maka ruang pelayanan di Kecamatan Sukorejo telah memfasilitasi adanya link aduan yang dapat diakses melalui whatsapp, instagram, facebook, website, email dan telepon serta adanya anjungan layanan yang didalamnya menampung seluruh saran serta kritikan dari pemohon layanan.

9. Sarana dan prasarana

Sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tentunya seluruh sarana prasarana pendukung layanan harus memenuhi syarat. Secara berkelanjutan dilaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pendukung layanan kepada masyarakat baik sarana prasarana utama maupun penunjang, termasuk pemeliharaan pada software penunjang layanan. Merujuk terhadap kesembilan unsur tersebut, dapat diidentifikasi kondisi pelayanan publik di Kecamatan Sukorejo, permasalahan, dan solusi agar ke depan pelaksanaan pelayanan bisa berjalan lebih baik.

Faktor Penghambat :

Pada Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 Kecamatan Sukorejo, diuraikan 3 (tiga) nilai terendah dari (sembilan) unsur pengambilan nilai SKM tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kantor Kecamatan Sukorejo beserta kelurahan-kelurahannya tahun 2024, ditemukan bahwa terdapat tiga unsur dengan nilai terendah. Nilai ini diperoleh dari total nilai per unsur yang dihitung berdasarkan data survei di tingkat kecamatan dan kelurahan. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Waktu Penyelesaian

Unsur waktu penyelesaian memperoleh nilai total sebesar 93,28 yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa durasi penyelesaian layanan masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor prosedur yang kurang efisien, atau kendala teknis dalam proses pelayanan.

b. Prosedur Pelayanan

Unsur prosedur layanan mencatat nilai total sebesar 93,56 menjadikannya unsur dengan nilai terendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami langkah-langkah atau persyaratan administratif dalam prosedur pelayanan. Waktu layanan menjadi lebih lama karena masyarakat harus kembali untuk melengkapi berkas yang kurang.

c. Persyaratan

Unsur persyaratan mencatat nilai total sebesar 94,38 sedikit lebih tinggi dari dua unsur sebelumnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa beberapa persyaratan pelayanan masih dianggap rumit atau kurang jelas, sehingga menyulitkan mereka dalam melengkapi dokumen atau informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga unsur terendah dituangkanlah rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana ini memprioritaskan unsur nilai paling rendah dari hasil SKM tahun 2024. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM tahun 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Efisiensi Waktu Penyelesaian						
	Evaluasi	Program Penyelenggaraan	V	V	V	V	Kepala Seksie

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	prosedur layanan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat disederhanakan	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan					Pelayanan Umum
	Tingkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan dan alokasikan sumber daya yang cukup untuk menangani volume layanan yang tinggi.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksi Pelayanan Umum
2	Sosialisasi dan Penyederhanaan Persyaratan						
	Susun panduan layanan yang sederhana, jelas, dan mudah diakses, baik secara online maupun offline.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksi Pelayanan Umum
	Mengadakan sesi sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksi Pelayanan Umum
3	Transparansi Biaya dan Persyaratan Layanan						
	Publikasikan tarif resmi, jenis layanan, dan persyaratan layanan secara konsisten melalui berbagai media, termasuk	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	V	V	V	V	Kepala Seksi Pelayanan Umum

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	papan informasi di kantor dan situs web kecamatan.						

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Untuk mengukur pencapaian atas sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”, berdasarkan dokumen Perubahan Renstra tahun 2024-2026 telah ditetapkan indikator kinerja, yaitu persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan dengan target 100% dan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang sesuai standart}}{\text{Jumlah Pelayanan}} \times 100\%$$

Definisi Operasional dari indikator tersebut, yaitu Indikator yang mengukur tingkat kesesuaian pelayanan kepada masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan standart pelayanan. Standart pelayanan yang dimaksud mengacu pada Surat Keputusan Camat Sukorejo Nomor 188/ 3 /410.403.15/2024 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Pada tahun 2024 masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Sukorejo adalah sebanyak 1.172 orang, dimana semua pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan tersebut, yaitu :

$$\frac{1.172 \text{ pelayanan yang sesuai dengan standar}}{1.172 \text{ Pelayanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga didapatkan capaian kinerja pada sasaran tersebut pada tahun 2024 adalah 100%. Pengukuran dari sasaran tersebut didasarkan pada buku pelayanan yang diisi oleh setiap masyarakat pencari pelayanan di Kecamatan Sukorejo. Dari data tersebut semua masyarakat pemohon layanan merasa puas, yaitu sebanyak 1.172 orang. Dalam Persentase, kualitas pelayanan Kecamatan Sukorejo bernilai 100% yang berarti bahwa kinerja unit pelayanan sangat baik. Indikator tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sasaran ini selama tahun 2024.

Faktor pendukung dari capaian ini adalah adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan adanya aplikasi layanan “SILPUSITRON dan SITARJO” selain itu adanya peningkatan kapasitas ASN yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Untuk mencapai capaian kinerja dari sasaran tersebut ditetapkan satu Indikator Kinerja, yaitu Persentase layanan Kecamatan tepat waktu dengan target sebesar 100%. Formulasi perhitungan indikator tersebut, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan tepat waktu}}{\text{Jumlah semua pelayanan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 semua layanan dilaksanakan tepat waktu dan tidak ada berkas yang tertunda karena belum mendapatkan tanda tangan dikarenakan telah terdapat TTE (Tanda Tangan Elektronik), sehingga didapatkan :

$$\frac{1.173 \text{ pelayanan tepat waktu}}{1.172 \text{ Pelayanan}} \times 100\% = 100\%$$

Dari 1.172 orang pencari layanan semua berkas tidak ada yang tertunda. Jadi hasil realisasi capaian kinerja sasaran ini, yaitu sebesar 100%. Dengan demikian, maka target dari indikator kinerja tersebut telah terlaksana sesuai dengan perencanaan di awal tahun.

Faktor pendukung capaian ini adalah adanya pelayanan yang cepat yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan serta implementasi penggunaan tanda tangan elektronik. Faktor penghambatnya antara lain adanya permasalahan teknis seperti gangguan jaringan internet atau gangguan pada aplikasi. Upaya tindak lanjut yang dilakukan, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan baik secara online maupun offline.

4. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah

Untuk mencapai capaian kinerja dari sasaran tersebut ditetapkan satu Indikator Kinerja, yaitu Persentase kelurahan berdaya dengan target 100%. Definisi Operasional dari Indikator tersebut, yaitu Indikator yang mengukur tingkat keberdayaan kelurahan. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan

kelurahan dalam program RT Keren. Formulasi perhitungan dari Indikator tersebut, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang mengikuti program kelurahan berdaya}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100\%$$

Dari formulasi perhitungan tersebut didapatkan Kelurahan Berdaya pada tahun 2024 :

$$\frac{7 \text{ kelurahan yang mengikuti program kelurahan berdaya}}{7 \text{ Kelurahan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi capaian indikator sasaran tersebut untuk tahun 2024 ini adalah 100%. Dimana seluruh kelurahan di Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan Berdaya dan kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan berdaya dengan sangat baik, sehingga capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** adalah 100%.

RT Keren merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang fisik dan non fisik. Bidang fisik yang dilaksanakan berupa pembangunan fisik konstruksi sarana dan prasarana umum di masing - masing wilayah RT. Sedangkan bidang non fisik berupa pelatihan dengan sasaran warga di masing - masing wilayah RT. Penentuan jenis dan titik pembangunan fisik konstruksi maupun jenis pelatihan adalah berdasarkan usulan dari masing – masing RT. Pelaksana dari RT Keren ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk pada tingkat RW. Faktor pendukung dari capaian ini diantaranya adanya dukungan anggaran yang memadai. Sementara faktor penghambatnya adalah perencanaan dari masyarakat yang kurang matang menyebabkan pelaksanaan yang kurang optimal atau terhambat, sehingga pelaksanaan RT Keren sering berubah pada P-APBD. Upaya tindak lanjutnya adalah dengan melakukan pendampingan pada masyarakat untuk membuat perencanaan yang lebih matang.

5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada sasaran tersebut terdapat 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan Persentase RT berdaya dengan target 100%. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti :

$$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- b. Persentase RT Berdaya :

$$\frac{\text{Jumlah RT yang mengikuti program RT berdaya}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

Dari formulasi tersebut didapatkan, yaitu :

- a. 12 Laporan Koordinasi
- $$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Indikator pertama dapat dihitung dengan membandingkan antara koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ada. Pada tahun 2024, target kinerja dari indikator program ini adalah 100% , dan pada akhir tahun didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana kemudian didapat pula capaian kinerja sebesar 100%.

- b. 189 RT yang mengikuti program RT berdaya
- $$\frac{189 \text{ RT}}{189 \text{ RT}} \times 100\% = 100\%$$

Indikator kinerja kedua dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah RT yang berdaya dengan jumlah seluruh RT yang berada di Kecamatan Sukorejo. Pada Tahun 2024 target kinerja dari indikator ini adalah 100%. Sedangkan realisasinya sebesar 100 %, sehingga realisasi capaian pada indikator kinerja kedua yaitu 100%.

Selain kegiatan RT Keren, pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Pada kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan sub kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat. Pada kegiatan tersebut berhasil mencapai target kinerja 100%. Dengan indikator Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar. Semua kelembagaan seperti pertemuan sehat jiwa, FKKS, Karang Taruna telah terfasilitasi dengan baik selama tahun 2024. Selain itu terdapat kegiatan peningkatan perekonomian berupa pameran UMKM yang telah berhasil dilaksanakan pada bulan Juni 2023 di Lapangan Kelurahan Blitar. Dengan adanya kegiatan tersebut mampu mengembangkan potensi UMKM di Kecamatan Sukorejo.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung

Aktif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul baik pada masyarakat maupun tenaga pendamping RT Keren, sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan, pemeliharaan terhadap *Software* maupun *hardware* dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dapat dipenuhi semua. Seperti halnya SOP, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sarana prasarana pendukung layanan serta mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Terkait dengan improvisasi dengan perkembangan jaman yaitu dalam pelayanan di Tahun 2024, Kecamatan Sukorejo memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sukorejo. Selain itu, hubungan serta koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kecamatan (TNI dan POLRI) secara terus menerus dijalin dengan baik untuk mendukung Program Walikota seperti RT Keren agar tercapainya Kelurahan berdaya.

Faktor Penghambat : Masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat.

Upaya Tindaklanjuti : Mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sektor yang terkait di lingkup Kecamatan Sukorejo.

6. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2024 telah ditetapkan target sebesar 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah koordinasi pemerintahan umum pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Kemudian berdasarkan formulasi perhitungan tersebut didapatkan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{12 \text{ Laporan Koordinasi}}{12 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Pengukuran kinerja yang dilakukan di akhir tahun 2024 didapatkan realisasi kinerja sebesar 100% yang mana menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor Pendukung : Hal ini terwujud dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara masing-masing instansi ini seperti kegiatan forum pimpinan kecamatan, FKUB dan FKDM yang mana forum-forum ini diselenggarakan untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Selain itu, juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima pilar yang ada di Kecamatan Sukorejo.

Faktor Penghambat : Penanganan permasalahan yang terkadang masih terganjal pada kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh OPD tertentu.

Upaya Tindaklanjuti : Menjaga keharmonisan Hubungan koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kecamatan. Selain itu, juga membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

7. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator dari sasaran “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian Kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)	A (85,37)	100,67 %

Sumber : Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022

Indikator sasaran ini, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang didapatkan dari Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review Irda. Dimana Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sukorejo berdasarkan hasil review Irda untuk tahun 2024 ini adalah 85,37 yang berdasarkan rating kategori penilaian termasuk pada predikat A (Memuaskan) .

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Faktor pendukung dari capaian ini adalah adanya pemenuhan 4(empat) komponen dokumen pelaporan implementasi SAKIP, yaitu sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30%	27,11
8	Pengukuran Kinerja	30%	24,23
C	Pelaporan Kinerja	15 %	13,40
D	Evaluasi Internal	25 %	20,63
	Jumlah	100%	85,37

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo telah mengalami peningkatan, sehingga capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** adalah 100,67 %.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP terdapat beberapa Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjuti dari Evaluasi SAKIP, yaitu sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menyusun dokumen perencanaan yang terdiri atas Renstra, Renja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dokumen perencanaan dan anggaran serta telah Menyusun Rencana Aksi atas kinerja sasaran.
2. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor sampai dengan tahun berjalan.
3. Dokumen Renstra telah direviu. Hasil Reviu Renstra ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Renstra melalui Peraturan Walikota Nomer 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Nomer 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan memadai melalui aplikasi SAKIP.
5. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, telah mempengaruhi penyesuaian strategi, arah kebijakan dan aktivitas serta telah diakomodir pada dokumen perencanaan tahun berikutnya.
6. Laporan kinerja Kecamatan Sukorejo telah disusun sesuai standart, diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu.
7. Evaluasi mandiri telah dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Faktor Penghambat :

1. Dokumen perencanaan kinerja telah disusun, kinerja dan indikator kinerja sasaran dalam dokumen perencanaan telah menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level, namun penetapan target belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, pohon kinerja belum terintegrasi dengan crosscutting. Selain itu crosscutting yang dihasilkan belum menggambarkan crosscutting antar bidang dan perangkat daerah.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang, berkelanjutan

dan dilaksanakan secara periodik (tribulanan), pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.

3. Laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, mengungkapkan seluruh informasi pencapaian kinerja serta telah menggambarkan kualitas alas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya. Namun, Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan formulasi perhitungan dan analisa efisiensi atas seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan.
4. Laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk pencapaian kinerja serta telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya, namun penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai dan belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
5. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja seluruhnya telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk efektivitas dan akuntabilitas kinerja dan belum dimanfaatkan dengan optimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Terhadap permasalahan di atas, disarankan kepada Camat Sukorejo Kota Blitar agar melaksanakan tindaklanjut sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan penetapan target indikator kinerja dengan memperhatikan realisasi kinerja periode sebelumnya.
- b. Menggambarkan crosscutting antar bidang dan perangkat daerah serta mengintegrasikan crosscutting ke dalam Pohon Kinerja.
- c. Kedepan melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Menyajikan formulasi perhitungan dan analisa efisiensi atas seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan pada Laporan Kinerja
- e. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan dan hasil pengukuran kinerja untuk membangun budaya kinerja serta meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh seluruh unit/ satuan kerja.
- f. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan serta peningkatan kinerja organisasi.

2) PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022- 2024

Pada tahun 2024 kita melaksanakan visi misi Walikota yang berada dalam RPJMD 2021-2026 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra 2021-2026. Apabila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI		
						2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89,10)	Baik (89,11)	Sangat Baik (90,26)	Sangat Baik (90,61)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97%	97%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75 %	75 %	100%	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase RT berdaya	75%	75%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	A (84,76)	A (84,80)	A (85,00)	A (85,16)	A (85,37)

Sumber: LKPJ Tahun 2022-2024 Kecamatan Sukorejo

3) PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA

Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024 apabila dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA	Realisasi sd 2024	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89,20)	Sangat Baik (90,61)	101,58 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100 %	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%	100%	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,90)	A (85,37)	100,55 %

Sumber: RENSTRA Kecamatan Sukorejo Tahun 2021 – 2026 dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk sasaran strategis pertama “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yang dinilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024, yaitu 90,61. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keseriusan dari Kecamatan Sukorejo untuk memperbaiki proses pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil survey IKM menyebutkan bahwa diperlukan Untuk meningkatkan nilai pelayanan maka diperlukan pelayanan berbasis IT sampai tingkat kelurahan guna meminimalisir persyaratan dan prosedur pengajuan layanan selain itu perlu adanya kegiatan rutin yang sifatnya motivasi kepada petugas layanan kecamatan guna peningkatan kompetensi setiap petugas. Secara umum pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sukorejo berbasis IT,

namun belum maksimal. Artinya pemohon masih menuju ke petugas layanan guna mendapatkan layanan, seharusnya dengan digunakannya IT maka pemohon tidak perlu mendatangi pemberi layanan, sehingga meminimalisir resiko kecelakaan bila pemohon harus mendatangi petugas layanan di kecamatan. Oleh karena itu embrio aplikasi pelayanan berbasis system, yaitu JELASIN SITARJO perlu dimaksimalkan dan diterapkan di 7 (tujuh) kelurahan dan kecamatan dalam memberikan pelayanan. Selain Aplikasi JELASIN SITARJO (Jendela Informasi Kecamatan Sukorejo), terdapat pula aplikasi SILPUSITRON yang memudahkan input data masyarakat pengguna layanan. Dari aplikasi SILPUSITRON menghasilkan output surat yang lebih efektif, dan efisien.

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua, yaitu meningkatnya kualitas pembangunan wilayah yang dinilai dari persentase kelurahan berdaya, maka selama tahun 2024 realisasi kinerja indikatornya yaitu 100%, yang artinya seluruh kelurahan di Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan Berdaya dan kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan berdaya dengan sangat baik, sehingga capaian kinerja sasaran kedua adalah 100%.

Untuk sasaran strategis ketiga, yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah yang dinilai dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 nilai SAKIP Kecamatan Sukorejo adalah A (85,37) yang artinya kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo adalah sangat Baik dikarenakan tertib administrasi, tepat waktu dan sesuai dengan standar.

4) PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN 2023 DENGAN KECAMATAN LAIN

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan Kecamatan Lain

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN SUKOREJO				KECAMATAN SANANWETAN				KECAMATAN KEPANJENKIDUL				KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN			
			TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Baik (89,10)	Sangat Baik (90,26)	Sangat Baik (90,61)	Baik (86)	Baik (88)	Baik (87,98)	Baik (87,98)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91)	Baik (84,22)	Sangat Baik (91)	-	Sangat Baik (90)	Baik 88,52	Sangat Baik (95,40)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	100%	100%	100%	97%	100%	98,63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	-	-	-	-
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	A (84,80)	A (85,16)	A (85,37)	A(86,88)	A(87,89)	A(85,06)	A(85,04)	A(85,5)	A(85,5)	A(85,09)	A(85,31)	-	A (80)	BB (79,05)	A (80,05)

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2023-2024

Apabila diperhatikan data di atas, maka realisasi target Kecamatan Sukorejo di atas Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Kepanjenkidul lebih tinggi daripada Kecamatan lainnya. Namun bila dianalisa lebih mendalam peningkatan prosentase capaian target ketiga Kecamatan tersebut dari tahun 2023 ke tahun 2024 hampir sama. Apabila dibandingkan dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, maka realisasi target ketiga Kecamatan tersebut lebih tinggi. Terlepas data tersebut maka dapat dibaca bahwa ketiga kecamatan yang ada di Kota Blitar serius dalam melaksanakan 9 (Sembilan) indikator pelayanan yang tertuang dalam survey IKM.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan capaian nilai IKM Kecamatan Sukorejo lebih tinggi daripada Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan IKM Kecamatan Kepanjenkidul. Sesuai data di atas, maka kualitas pelayanan publik pada ketiga kecamatan di Kota Blitar tahun 2023 dan 2024 adalah sangat baik. Hal ini menunjukkan keseriusan perangkat di ketiga kecamatan di Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun permintaan dari instansi lainnya telah dilaksanakan dengan sangat baik.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sukorejo.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Sasaran Pembangunan Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp. 30.803.293.364,00	100%

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	Rp. 623.698.404,00	2,02%
Sasaran II : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Rp. 17.000.398.852,00	55,19%
Sasaran III : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rp. 13.179.196.108,00	42,79%

Sumber: Data Penjabaran P-APBD Kota Blitar Tahun 2024 (Kecamatan beserta Kelurahan)

Pada tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tujuan **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu : meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dengan prosentase alokasi anggaran sebesar 2,02% (Rp. 623.698.404,00), meningkatnya kualitas pembangunan wilayah dengan prosentase alokasi anggaran sebesar 55,19% (Rp. 17.000.398.852,00), dan meningkatnya kualitas pembangunan wilayah dengan prosentase alokasi anggaran sebesar 42,79% (Rp. 13.179.196.108,00).

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar memiliki anggaran sebesar **Rp. 30.041.241.820,00** (APBD murni) dan **Rp. 30.803.293.364,00** (Perubahan APBD) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2024 sebesar **98,71%** atau sebesar **Rp. 30.405.157.337,00**. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo yang didukung Anggaran tersebut yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan sasaran I yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ”** sebesar Rp. 623.698.404,00. Pagu tersebut merupakan anggaran Non Administrasi Umum di bagian pelayanan kepada masyarakat. Pada sasaran II, yaitu **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** didukung oleh anggaran Non Administrasi Umum selain pelayanan sebesar **Rp. 17.000.398.852,00**. Pada sasaran III, yaitu **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** didukung oleh anggaran Administrasi Umum sebesar **Rp. 13.179.196.108,00**. Dengan dukungan anggaran sebagaimana di atas, Kecamatan Sukorejo berhasil mencapai kinerja sesuai dengan targetnya. Berikut penjelasan pencapaian kinerja secara detail terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89,10)	Sangat Baik (90,61)	101,69%	30.803.293.364,00	30.405.157.337,00	98,71 %
2	Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100 %	100 %	100%			
	Program I : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100%	623.698.404,00	590.230.108,00	94,63 %
3	Sasaran II : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100 %	100%			
	Program II : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %	16.059.013.002,00	15.975.950.971,00	99,87 %
		2. Persentase RT berdaya	100%	100%	100%			
	Program III : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	941.385.850,00	934.862.606,00	99,31 %
4	Sasaran IIII : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)	A (85,37)	100,67 %			
	Program IV : Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Baik (84,80)	Sangat Baik (90,08)	106,23%	13.179.196.108,00	12.904.113.652,00	97,91%

Sumber: Pengukuran Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kinerja pada :

- Program I terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100% dan serapan realisasi anggaran sebesar 94,63% atau Rp. 590.230.108,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 623.698.404,00;
- Program II terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100% dan serapan realisasi anggaran sebesar 99,87% atau Rp. 15.975.950.971,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 16.059.013.002,00.
- Program III terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100 % dan serapan realisasi anggaran sebesar 99,31% atau Rp. 934.862.606 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 941.385.850,00; dan
- Program IV terealisasi sebesar 90,08 dengan prosentase capaian sebesar 106,23% dan serapan realisasi anggaran sebesar 97,91% atau Rp. 12.904.113.652,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.179.196.108,00.

Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi per kegiatan dari Kecamatan Sukorejo dapat kita perhatikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.179.196.108,00	12.904.113.652,00	97,91%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	19.884.386,00	19.346.900,00	97,30%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.553.177.828,00	9.371.146.773,00	98,09%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	427.372.691,00	426.008.750,00	99,68%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.315.366,00	643.905.186,00	98,71%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.528.209,00	153.179.399,00	99,13%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.222.369.906,00	1.164.696.884,00	95,28%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.547.722,00	1.125.829.760,00	97,94%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	623.698.404,00	590.230.108,00	94,63%
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	623.698.404,00	590.230.108,00	94,63%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.059.013.002,00	15.975.950.971,00	99,87%
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.138.753.777,00	15.065.584.611,00	99,52%
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	920.259.225,00	910.366.360,00	98,92%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	941.385.850,00	934.862.606,00	99,31%
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	941.385.850,00	934.862.606,00	99,31%
JUMLAH		30.803.293.364,00	30.405.157.337,00	98,71%

Sumber: SIPD Kota Blitar Tahun 2024

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Sukorejo selama tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	101,69%	98,71%	1,03
Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	94,63%	1,06
Sasaran II : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	99,47%	1,01
Sasaran III : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,67%	97,91%	1,03

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Keterangan tingkat efisiensi :
≥ 1 : efisien
< 1 : tidak efisien
Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan terhadap Analisa Pengukuran

Efisiensi Kinerja dan Keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,06. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,63 %.
2. Analisis Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,01. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,47 %.
3. Analisis Sasaran Strategis 3: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,03. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100,67% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 97,91%.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi karena inflasi pasca covid-19, Kecamatan Sukorejo dan 7 (tujuh) kelurahan yang ada didalamnya kembali menyusun rencana kegiatan dan menata ulang perekonomian di wilayah Kecamatan Sukorejo yang diwujudkan dengan melalui berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima diantaranya yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Prestasi/Penghargaan Kecamatan Sukorejo tahun 2024

No	Penghargaan	Tingkat Penghargaan	Tahun	Keterangan
1	Penghargaan APJW II Tahun 2024 kategori Sinergi Antar Lembaga	Provinsi	2024	Kelurahan Pakunden
2	Penghargaan Juara 2 Kawasan Tanpa Rokok	Kota Blitar	2024	Kecamatan Sukorejo

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2024 pasca Pandemi Covid 19 mewabah di dunia banyak program dan kegiatan di pemerintahan yang pelaksanaannya difokuskan untuk percepatan pemulihan perekonomian setelah masa pandemi covid-19, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo.

Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan anggaran **Rp. 30.803.293.364,00** (setelah perubahan APBD 2024) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2024 sebesar **98,71 %** atau sebesar **Rp. 30.405.157.337,00**. Besarnya nilai serapan dapat kita ambil kesimpulan bahwa hal tersebut menunjukkan Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” dengan target bernilai baik (89,10). Pengukuran kualitas pelayanan publik dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Semester I dan II. Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai IKM 90,61.

Pada bab – bab sebelumnya telah kami sajikan berbagai hal terkait kinerja Kecamatan Sukorejo, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo tercapai sangat baik dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 yaitu 90,61. Sedangkan Pengukuran kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Sukorejo 100,22% , sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran pada tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (89,10)	Sangat Baik (90,61)	101,69%	17.624.097.256,00	17.501.043.685,00	99,30 %
2	Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100 %	100 %	100%			
	Program I : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100%	623.698.404,00	590.230.108,00	94,63 %
3	Sasaran II : Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%	100 %	100%			
	Program II : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %	16.059.013.002,00	15.975.950.971,00	99,87 %
		2. Persentase RT berdaya	100%	100%	100%			
	Program III : Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	941.385.850,00	934.862.606,00	99,31 %
4	Sasaran III : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)	A (85,37)	100,67 %	13.179.196.108,00	12.904.113.652,00	97,91%
	Program IV : Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Baik (84,80)	Sangat Baik (90,08)	106,23%	13.179.196.108,00	12.904.113.652,00	97,91%

Pada perincian tersebut dapat kita simpulkan, yaitu :

1. Sasaran I : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan tercapai sebesar 100%.

2. Sasaran II : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah dengan indikator Persentase kelurahan berdaya tercapai sebesar 100%.
3. Sasaran III : Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 100,67%.

Disamping itu dapat diambil kesimpulan terkait analisa Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Sukorejo dengan rincian hasil sebagai berikut :

- a. Analisis Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,06. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,63 %. Meskipun demikian pada sasaran I tersebut terdapat beberapa permasalahan, yaitu ketika Pejabat berwenang tidak sedang berada di tempat dikarenakan ada kegiatan lain, sehingga pelayanan kecamatan tertunda. Upaya Tindaklanjut yang kami lakukan dengan adanya hambatan tersebut, maka Kecamatan Sukorejo memanfaatkan Tandatangan Elektronik sebaik mungkin, serta meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dan pejabat berwenang dalam mempergunakan Teknologi Digital demi meningkatkan serta memperbaiki layanan di Kecamatan Sukorejo. Selain itu, permasalahan yang menjadi penghambat sasaran I, yaitu pergantian petugas layanan yang baru sehingga kompetensi petugas pelayanan yang masih kurang. Upaya Tindaklanjut yang kami lakukan, yaitu dengan mengadakan peningkatan kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Sukorejo dengan memberikan Bimbingan Teknis Layanan.
- b. Analisis Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,01. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,47 %. Meskipun demikian terdapat permasalahan yang menjadi Faktor Penghambat pada Sasaran II, yaitu masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat. Upaya tindaklanjut yang kami lakukan , yaitu dengan mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sektor yang terkait di lingkup Kecamatan Sukorejo.
- c. Analisis Sasaran Strategis 3: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,03. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100,67% dilaksanakan dengan

anggaran sebesar 97,91%. Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Sukorejo tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo, sehingga pada tahun 2024 nilai SAKIP Kecamatan Sukorejo adalah A (85,37) yang artinya kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo adalah Sangat Baik dikarenakan tertib administrasi, tepat waktu dan sesuai dengan standar. Meskipun demikian, pada sasaran ini terdapat permasalahan yang masih perlu diperhatikan yaitu kurangnya SDM perangkat daerah yang mampu dalam IT untuk bekerja dengan aplikasi. Upaya tindaklanjut yang kami lakukan, yaitu dengan mengadakan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah Kecamatan Sukorejo agar mampu dalam IT dan dapat bekerja menggunakan aplikasi terkait.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja Kecamatan Sukorejo, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam hal ketepatan waktu pelayanan, kualitas petugas pelayanan, maupun kualitas dokumen hasil layanan dengan memperhatikan masukan dari pengguna layanan.	Meningkatkan Kualitas layanan baik dari segi sarpras, petugas layanan, SOP layanan dan tindaklanjut pengaduan/kritik layanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	√		
	Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah dengan cara meningkatkan koordinasi dan	Berkolaborasi dengan OPD terkait dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan	√		

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
	hubungan kerja sama dengan OPD dan pihak yang terkait sehingga terbentuk sinergi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.	menanggulangi kemiskinan masyarakat Kecamatan Sukorejo dengan pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Alam dan Tim Terpadu Penanggulangan Masalah Sosial.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM • Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2.	Meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan dengan melalui peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓		

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Langkah perbaikan LKjIP tahun 2024 Kecamatan Sukorejo, Tujuan Utama yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan didukung oleh sebagaimana dibawah ini :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan

Langkah perbaikan :

Meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam hal ketepatan waktu pelayanan, kualitas petugas pelayanan, maupun kualitas dokumen hasil layanan dengan memperhatikan masukan dari pengguna layanan dalam hal ini masyarakat, mulai dari tata tempat, sarana prasarana hingga kualitas waktu pemenuhan hasil layanan dapat ditetapkan dengan meminta saran masyarakat pengguna layanan. Konsep ini lebih humanis karena setiap pemohon dapat merasakan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu melalui konsep ini juga memberikan ruang kepada pemohon untuk memberikan saran dan kritik guna perbaikan layanan, artinya saran dan kritik yang disampaikan dapat disampaikan kepada penyedia layanan dan wajib ditindaklanjuti segera guna perbaikan layanan.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah

Langkah perbaikan :

Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan OPD dan pihak yang terkait sehingga terbentuk sinergi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Melalui pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Alam dan Tim Terpadu Penanggulangan Masalah Sosial serta Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Langkah perbaikan :

Meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan dengan melalui peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan, yaitu dengan Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan dan kelurahan.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Blitarh menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.



LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

MISI 5 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

TUJUAN					SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2020	2023				2020	2023				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Baik (89,10)	Baik(89,10)	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	(Jumlah Pelayanan yang sesuai standart : Jumlah Pelayanan) x 100%	100%	100%	Peningkatan sistem penyelenggara an pelayanan publik	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan. 2. Peningkatan pengendalian pelayanan publik. 3. Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta keprotokolan.		
					2.	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase Kelurahan berdaya	(Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Berdaya/Jumlah Kelurahan) x 100%	100%	100%	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan. 2. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan.	
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review Irda	A	A	3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo) pada tahun berjalan	A (84,80)	A (84,80)	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan. 2. Peningkatan pemberdayaan masvarakat di kelurahan.		

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR



PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUKOREJO

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah																			
Sasaran : Meningkatkan kinerja perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	(84,80)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Baik	(84,80)	13.179.196.108	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	19.884.386	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2.525.500	KECAMATAN SUKOREJO
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	615.800	KELURAHAN PAKUNDEN
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	934.100	KELURAHAN BLITAR
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	643.078	KELURAHAN TLUMPU
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	848.000	KELURAHAN TURI
														Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	10	Dokumen	2.458.300	KELURAHAN KARANGSARI

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											n Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	KELURAHAN SUKOREJO
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	KELURAHAN TANJUNGSARI
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	KECAMATAN SUKOREJO
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	KELURAHAN PAKUNDEN

SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN				SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	10	11	12	13		14	15	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	952.900	KELURAHAN BLITAR	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	532.908	KELURAHAN TLUMPU	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	1.816.000	KELURAHAN TURI	

SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN				SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	10	11	12	13		14	15	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	2.291.300	KELURAHAN KARANGSARI	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	514.800	KELURAHAN SUKOREJO	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	1.484.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	9.553.177.828	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	9.544.776.052	KECAMATAN SUKOREJO
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9 Laporan	1.607.256	KECAMATAN SUKOREJO
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	903.720	KELURAHAN PAKUNDEN
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	940.200	KELURAHAN BLITAR

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
															mesteran SKPD				
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	782.500	KELURAHAN TLUMPU
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	Laporan	1.180.000	KELURAHAN TURI
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	1.633.300	KELURAHAN KARANGSARI

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
															Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	514.800	KELURAHAN SUKOREJO
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	840.000	KELURAHAN TANJUNGSARI
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	427.372.691	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	58.244.900	KECAMATAN SUKOREJO

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	8.041.600	KELURAHAN PAKUNDEN
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	KELURAHAN BLITAR
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	8.041.600	KELURAHAN TLUMPU
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	KELURAHAN TURI
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	8.041.600	KELURAHAN SUKOREJO
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	5.600.000	KELURAHAN TANJUNGSARI
											Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 0 Orang	163.615.041	KECAMATAN SUKOREJO

SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN				SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	10	11	12	13		14	15	
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	140	Orang	17.400.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	90	Orang	20.241.300	KELURAHAN BLITAR	
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang	26.303.500	KELURAHAN TLUMPU	
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	13	Orang	22.957.800	KELURAHAN TURI	
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	35.086.039	KELURAHAN KARANGSARI	
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan	9	Orang	19.368.000	KELURAHAN SUKOREJO	

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
												Perundang-Undangan			
											Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	22.431.311	KELURAHAN TANJUNGSARI
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	652.315.366	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.827.300	KECAMATAN SUKOREJO
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.878.000	KELURAHAN PAKUNDEN
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.495.400	KELURAHAN BLITAR
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.668.600	KELURAHAN TLUMPU

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	932.600	KELURAHAN TURI
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.389.300	KELURAHAN KARANGSARI
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.506.000	KELURAHAN SUKOREJO
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.322.600	KELURAHAN TANJUNGSARI
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	47.454.900	KECAMATAN SUKOREJO
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.259.963	KELURAHAN PAKUNDEN
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.022.000	KELURAHAN BLITAR

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.027.700	KELURAHAN TLUMPU
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.734.500	KELURAHAN TURI
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.909.300	KELURAHAN KARANGSARI
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.290.600	KELURAHAN SUKOREJO
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.677.800	KELURAHAN TANJUNGSARI
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.723.500	KECAMATAN SUKOREJO
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.489.730	KELURAHAN PAKUNDEN
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.516.900	KELURAHAN BLITAR
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.855.900	KELURAHAN TLUMPU
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.345.900	KELURAHAN TURI

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.695.600	KELURAHAN KARANGSARI
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.734.400	KELURAHAN SUKOREJO
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.954.600	KELURAHAN TANJUNGSARI
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	106.554.000	KECAMATAN SUKOREJO
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 1 Paket	3.352.400	KELURAHAN PAKUNDEN
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	995.000	KELURAHAN BLITAR
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.071.181	KELURAHAN TLUMPU
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	13.674.000	KELURAHAN TURI
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	41.307.500	KELURAHAN KARANGSARI
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	2.940.000	KELURAHAN SUKOREJO

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.187.400	KELURAHAN TANJUNGSARI
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.742.200	KECAMATAN SUKOREJO
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	2.896.892	KELURAHAN PAKUNDEN
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	3.015.100	KELURAHAN BLITAR
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	5.626.600	KELURAHAN TLUMPU
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	2.516.500	KELURAHAN TURI
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	8.380.100	KELURAHAN KARANGSARI
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	3.677.900	KELURAHAN SUKOREJO
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	5.350.000	KELURAHAN TANJUNGSARI

SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	10	11	12	13	14		15	
												an						
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	5.820.000	KECAMATAN SUKOREJO	
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	3.840.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	2.700.000	KELURAHAN BLITAR	
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2.700.000	KELURAHAN TLUMPU	
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2.700.000	KELURAHAN TURI	
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.900.000	KELURAHAN KARANGSARI	

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	3.840.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	1.920.000	KELURAHAN TANJUNGSARI
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	123.895.500	KECAMATAN SUKOREJO
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	%	154.528.209	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	Unit	91.456.443	KECAMATAN SUKOREJO
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	Unit	13.724.100	KELURAHAN PAKUNDEN
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	Unit	49.347.666	KELURAHAN SUKOREJO
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100	%	1.222.369.906	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	45.947.280	KECAMATAN SUKOREJO

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	28.000.960	KELURAHAN PAKUNDEN
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	16.215.493	KELURAHAN BLITAR
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	23.430.400	KELURAHAN TLUMPU
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	23.390.317	KELURAHAN TURI
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	12.160.000	KELURAHAN KARANGSARI
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	16.334.400	KELURAHAN SUKOREJO

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
															yang Disediakan				
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	16.499.384	KELURAHAN TANJUNGSARI
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.040.391.672	KECAMATAN SUKOREJO
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100	%	1.149.547.722	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	95.588.463	KECAMATAN SUKOREJO
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6.289.100	KELURAHAN PAKUNDEN

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	2.061.100	KELURAHAN BLITAR
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	1.500.000	KELURAHAN TURI
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	7.003.900	KELURAHAN KARANGSARI
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	10.276.000	KELURAHAN SUKOREJO

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	8.634.900	KELURAHAN TANJUNGSARI
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				1.800.000	KELURAHAN TLUMPU
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	24.953.000	KECAMATAN SUKOREJO
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	3.009.500	KELURAHAN PAKUNDEN
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	3.165.000	KELURAHAN BLITAR
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	16.170.000	KELURAHAN TLUMPU
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	Unit	8.943.100	KELURAHAN TURI
														Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	18	Unit	12.296.000	KELURAHAN KARANGSARI

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara			
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	Unit	6.606.500
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	3.123.000
											Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	5.000.338
											Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	5.000.000
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	895.166.821
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	13.600.000
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	19.361.000

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13	14	15	
Tujuan : Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	B a i k	(89)	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kecamatan Tepat Waktu	97	%	623.698.404	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100	%	623.698.404	Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaanaa n kegiatan pelayanankep ada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	6.176.400	KECAMATAN SUKOREJO
Sasaran : Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	9 8	%											Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaanaa n kegiatan pelayanankep ada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	923.200	KELURAHAN PAKUNDEN
														Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaanaa n kegiatan pelayanankep ada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	1.099.800	KELURAHAN BLITAR
														Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaanaa n kegiatan pelayanankep ada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	919.704	KELURAHAN TLUMPU
														Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaanaa n kegiatan pelayanankep ada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	1.008.000	KELURAHAN TURI
														Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaanaa n kegiatan pelayanankep ada masyarakat di Kecamatan	2	Dokumen	514.800	KELURAHAN SUKOREJO

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	370.463.700	KECAMATAN SUKOREJO
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	48.000.000	KELURAHAN PAKUNDEN
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	28.800.000	KELURAHAN BLITAR
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.200.000	KELURAHAN TLUMPU
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	23.600.000	KELURAHAN TURI

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	KELURAHAN KARANGSARI
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	KELURAHAN SUKOREJO
											Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	KELURAHAN TANJUNGSARI
Sasaran : Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	16.059.013.002	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	15.138.753.777	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	2	Lembaga	KECAMATAN SUKOREJO
				Persentase RT Berdaya	75 %						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	12	Lembaga	KELURAHAN PAKUNDEN

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											an di Kelurahan				
											Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga	16.118.000
											Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga	18.569.428
											Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	17	Lembaga	13.920.500

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
														Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang beartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	9	Lembaga	21.156.000	KELURAHAN KARANGSARI
														Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang beartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	9	Lembaga	38.141.000	KELURAHAN SUKOREJO
														Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	17	Pokmas	3.481.662.920	KECAMATAN SUKOREJO
														Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12	Pokmas/Ormas	2.020.126.100	KELURAHAN PAKUNDEN
														Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4	Pokmas/Ormas	1.033.853.616	KELURAHAN BLITAR
														Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4	Pokmas/Ormas	965.692.000	KELURAHAN TLUMPU

SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN				SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	10	11	12	13		14	15	
												Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10	Pokmas/Ormas	787.665.513	KELURAHAN TURI	
												Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6	Pokmas/Ormas	1.159.373.200	KELURAHAN KARANGSARI	
												Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	56	Pokmas/Ormas	3.079.447.000	KELURAHAN SUKOREJO	
												Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	9	Pokmas/Ormas	2.406.437.400	KELURAHAN TANJUNGSARI	
								Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100	%	920.259.225	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	8	Lembaga	202.534.528	KECAMATAN SUKOREJO
												Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Lembaga	91.299.700	KELURAHAN PAKUNDEN	
												Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4	Lembaga	121.166.800	KELURAHAN BLITAR	

SASARAN			PROGRAM					KEGIATAN				SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	10	11	12	13		14	15	
												Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	6	Lembaga	47.993.616	KELURAHAN TLUMPU	
												Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	8	Lembaga	68.390.300	KELURAHAN TURI	
												Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4	Lembaga	71.253.600	KELURAHAN KARANGSARI	
												Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4	Lembaga	74.200.300	KELURAHAN SUKOREJO	
												Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Lembaga	55.433.900	KELURAHAN TANJUNGSARI	
												Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	3	Laporan	123.737.900	KECAMATAN SUKOREJO	
												Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	3	Laporan	13.078.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
												Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2	Laporan	5.485.900	KELURAHAN BLITAR	

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2 Laporan	5.047.566	KELURAHAN TLUMPU
											Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	3 Laporan	6.910.000	KELURAHAN TURI
											Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2 Laporan	9.592.515	KELURAHAN KARANGSARI
											Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	3 Laporan	9.649.200	KELURAHAN SUKOREJO
											Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 Laporan	14.485.400	KELURAHAN TANJUNGSARI

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	%	941.385.850	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan , ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100	%	941.385.850	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	755	Orang	389.896.750	KECAMATAN SUKOREJO

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	236 Orang	88.690.000	KELURAHAN PAKUNDEN

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN					SUB KEGIATAN																				
URAIAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET		URAIAN		INDIKATOR PROGRAM		TARGET		PAGU		URAIAN		INDIKATOR KEGIATAN		TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		11		10		11		12		13		14		15			
																						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50		Orang		54.157.700		KELURAHAN BLITAR	

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
														Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang	78.627.500	KELURAHAN TLUMPU

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	206 Orang	61.088.000	KELURAHAN TURI

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14 2 Orang	54.163.900	KELURAHAN KARANGSARI

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	11		10	11	12	13		14	15
														Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	Orang	116.762.000	KELURAHAN SUKOREJO

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15
											Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	98.000.000	KELURAHAN TANJUNGSARI

Blitar, 23 September 2024

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JITO, S.Sos.

Jabatan : Camat Sukorejo Kota Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Camat Sukorejo Kota Blitar Kota Blitar

JITO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 196906011990031010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89.10 (Indeks)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100.00(%)
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100.00(%)
4	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.80 (Nilai)
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%
7	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%

No/Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	941,385,850.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16,059,013,002.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	623,696,404.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,179,196,108.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-Insentif Fiskal,PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Blitar, 23 September 2024

Gamal Sukorejo Kota Blitar Kota Blitar



Printed on @APLIKASI SAKIP KOTA BLITAR

PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	(Jumlah Pelayanan yang sesuai standart : Jumlah Pelayanan) x 100%	100%	100%	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 623.698.404,00	Rp.590.230.108,00	94,63%	
2	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Berdaya/Jumlah Kelurahan) x 100%	100%	100%	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.16.059.013.002,00	Rp.15.975.950.971,00	99,87%	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 941.385.850,00	Rp. 934.862.606	99,31%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo) pada tahun berjalan	A (84,80)	A(85,37)	100,67%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.13.179.196.108,00	Rp.12.904.113.652,00	97,91%	

Blitar, 31 Desember 2024

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR





